

**Pencegahan *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung
Ditinjau dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*
dan *Whistleblowing System***

Putu Mika Amritha ⁽¹⁾
Gde Herry Sugiarto Asana ⁽²⁾
Made Christin Dwitrayani ⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Triatma Mulya; e-mail: mikamritha@gmail.com

ABSTRACT

This research aint to determine impact of the implementation of public sector accounting, good corporate governance, and whistleblowing system on fraud prevention. This research was conducted on employes of Badung Regency Regional Apparatus Organization (OPD) with a research sample of 36 respondents who were taken using purposive sampling technique. All data obtained from the distribution of questionnaires is feasible to use, then analyzed using multiple linear regression tests, partial hypothesis tests (t tests) and model feasibility tests (f tests). the results showed that (1) the application of public sector accounting has a positive effect on fraud prevention in regional apparatus organizations (OPD) Badung Regency. This shows that the better or more the application of public sector accounting in the regional apparatus organization (OPD) Badung Regency, the more fraud prevention will increase in the regional apparatus organization (OPD) Badung Regency, (2) good corporate governance has a negative effect on fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) Badung Regency. This shows that the higher or higher the good corporate governance in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency, the more fraud prevention will decrease in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency, (3) the whistleblowing system has a positive effect on fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency. this shows that fraud prevention in the regional apparatus organization (OPD) of Badung Regency will increase.

Keywords: The implementation of public accounting standards; Good Corporate governance; Whistleblowing system; The prevention of fraud

Pendahuluan

Pembangunan Kabupaten atau Kota merupakan prioritas program pemerintah. Hal ini mengharuskan tiap penyajian laporan keuangan harus tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana kewajiban Pemerintah daerah tersebut diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menjelaskan mengenai karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik laporan keuangan haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam hal pertanggungjawaban, pencapaian hasil kerja suatu instansi dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah. Di Provinsi Bali, daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi yaitu Kabupaten Badung. Menurut bapenda.badungkab.go.id (12/06/2024) bahwa besarnya defisit APBD di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018. Kabupaten Badung juga berturut-turut mengalami defisit pada tahun 2017-2018. APBD Kabupaten Badung mengalami defisit APBD kabupaten terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten /kota lainnya di Provinsi Bali. Ditinjau dari laman bali.bps.go.id (12/06/2024), sejak 2020 sampai 2022 Kabupaten Badung masih menjadi penyumbang pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak berasal dari pendapatan pajak maupun dari sektor penjualan hasil daerah dan pariwisatanya. Maka dari itu, dengan PAD yang tinggi akan memicu terjadinya beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sistem informasi, kinerja pemerintah maupun laporan keuangan pada tahun tertentu. Informasi tentang akuntabilitas kinerja diperlukan untuk bahan pengambilan keputusan guna melakukan segala perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan suatu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi berdampak pada upaya terciptanya *good corporate governance*. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek *fraud* yang terjadi di berbagai instansi Pemerintah.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan sengaja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau bahkan lebih dari satu orang untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompok. Salah satu bentuk kecurangan adalah korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengemukakan dari 14 lembaga paling korup, urutan pertama diduduki oleh pemerintah. Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* berbeda dengan

kesalahan. Kesalahan ialah tindakan yang disebabkan karena ketidaksengajaan. Sedangkan kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang didasari atas kesengajaan bahkan hingga membuat rencana untuk melakukan kecurangan tersebut. Siregar dkk (2019) menyatakan bahwa jenis kecurangan yang paling sering ditemukan di Indonesia adalah korupsi dan dampak kerugian yang dihasilkan dari korupsi pun merupakan yang paling besar. Menurut bbs.binus.ac.id (22/09/2023), menyatakan bahwa jenis dan bentuk dari cabang *fraud* selain korupsi yaitu penyimpangan atas aset dan pernyataan palsu atau salah. Pada praktiknya, kecurangan laporan keuangan berarti menyebarkan informasi yang palsu dan telah dimanipulasikan jumlahnya untuk sebuah keperluan yang dibuat secara sengaja atau direncanakan yang memiliki tujuan untuk mengelabui para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Kasus tindakan kecurangan laporan keuangan banyak terjadi di Indonesia, di antaranya banyak terjadi di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra dan Bali.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik merupakan rangkaian kegiatan mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan lembaga publik atau instansi pemerintah. Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba lainnya adalah contoh entitas yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik di lembaga tinggi negara. Tujuan dari penerapan akuntansi sektor publik antara lain yakni sebagai *management control* dan sebagai *accountability*. Salah satu jenis akuntansi sektor publik yaitu Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*). Di Negara Indonesia sendiri *fraud* telah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang beroperasi di sektor publik. *Fraud* ini merupakan ancaman dalam manajemen suatu akuntansi sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen yang telah dibangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Dalam pelaksanaan penerapannya, *Good Corporate Governance* di instansi pemerintahan memerlukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada. Instansi atau perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai prosedur

tentang pemahaman suatu aturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerjanya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006).

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kesadaran akan anti kecurangan itu harus mendapat kontribusi dari berbagai pihak agar menciptakan prosedur pencegahan kecurangan yang efektif, membangun organisasi dengan pengendalian yang baik dan meningkatkan kepekaan terhadap tindak dan bahaya kecurangan bagi mutu organisasi yang terjaga. Seperti halnya ketepatan dan kesesuaian tanggung jawab serta wewenang tiap anggota organisasi harus sesuai dengan sistem operasional perusahaan (SOP) instansi masing-masing, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008).

Fraud Triangle Theory menjelaskan penyebab seorang melakukan *fraud* ada tiga faktor yakni, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud Triangle Theory* juga menjelaskan seorang dalam suatu instansi melakukan kecurangan karena daya kesempatan dan rendahnya rasionalisasi atau sikap dari para manajemen atau pegawai sehingga ketika melakukan kecurangan mereka selalu mencari pembenaran sendiri, sehingga memperkecil atau meminimalkan kesempatan yang ada adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi sebuah kecurangan.

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan entitas sektor publik baik pelaporan maupun pengelolaan keuangannya. Berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan mengenai pencegahan *fraud* dilakukan pada entitas BPR, Lembaga Keuangan maupun di Lembaga non-keuangan. Namun dari uraian diatas terdapat fenomena menarik pada sektor pemerintahan yang harus diteliti, sehingga penelitian ini merupakan *confirmatory reseach* atas topik yang sama dengan objek yang berbeda. Selain itu, variabel *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal yang dipilih masih belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik menganalisis mengenai pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan yakni di

Kabupaten Badung.

Berdasarkan *Fraud Triangle Teory* menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan *fraud* dikarenakan tiga faktor yakni, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap (*ratiolization*). *Fraud Triangel Theory* juga menjelaskan seorang dalam suatu instansi melakukan kecurangan karena daya kesempatan dan rendahnya rasionalisasi atau sikap dari para manajemen atau pegawai sehingga ketika melakukan kecurangan mereka selalu mencari pembenaran sendiri, sehingga memperkecil atau meminimalkan kesempatan yang ada adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi sebuah kecurangan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif mampu menghambat terjadinya tindakan *fraud*.

H₁: Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada OPD Kabupaten Badung

Good Corporate Governance menekankan akan bagaimana aktivitas dijalankan, bagaimana batasan-batasan serta bagaimana hak dan kewajiban para nasabah perusahaan tersebut. Sehingga timbul kejelasan akan tugas, kejelasan akan batas mana yang dapat dijangkau dan tidak sehingga tidak muncul ketimpangan diantara hak instansi dengan hak masyarakat. Dengan demikian kecurangan yang dilakukan seseorang dalam suatu instansi pemerintah dapat disebabkan karena kesempatan dan juga lemahnya rasionalisasi manajemen organisasi dalam mengontrol memajemen organisasi beserta anggotanya. Sehingga pencegahan *fraud* dapat ditekan dalam suatu organisasi atau instansi.

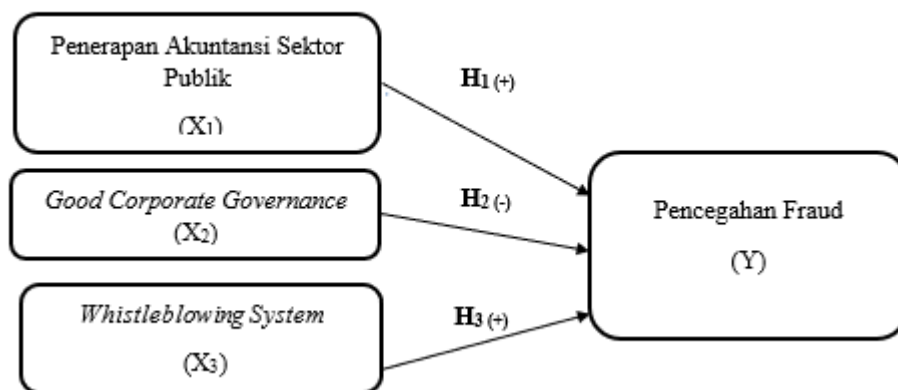
H₂: *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada OPD Kabupaten Badung

Whistleblowing System ialah sebuah pemberitahuan atau penyampaian informasi dari salah satu anggota organisasi maupun perusahaan atau pihak lain dari organisasi, dimana penyampaian ini berhubungan mengenai perilaku menyimpang atau diluar dari peraturan yang berlaku oleh seseorang yang melakukannya di dalam ruang lingkup perusahaan. Seseorang yang menyampaikan ini sering disebut dengan istilah *whistleblower*. Adanya sistem ini bukan hanya bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan tindakan kecurangan, namun sistem ini juga tidak langsung menjadi sebuah sarana untuk mengawasi kegiatan antar anggota.

H₃: *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada OPD Kabupaten Badung

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel. Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode penelitian ini lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang obyektif terhadap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator (Sugiyono, 2017).



Sumber : Data Diolah, 2024

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung dengan jumlah populasi sebanyak 50 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 responden. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya Uji *SPSS* yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Regresi Linier Berganda serta pengujian hipotesis.

Definisi operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Variabel	Indikator	No. Item	Skala	Referensi
Pencegahan Fraud (Y)	1. Penetapan kebijakan anti <i>fraud</i> 2. Prosedur 3. Teknik pengendalian 4. Kepekaan terhadap <i>fraud</i>	1-2 3 4 5-6	Ordinal	Priambodo (2016)
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X ₁)	1. Analisis bukti transaksi 2. Pencatatan terhadap bukti transaksi 3. Pengikhtisaran 4. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan	7-8 9 10 11	Likert	Bastian (2015)
<i>Good Corporate Governance</i> (X ₂)	1. Pemerintahan yang bersifat transparansi 2. Akuntabilitas 3. <i>Responsibility</i> 4. <i>Independence</i>	12-14 15 16 17-18	Likert	Emirzon (2006)
<i>Whistleblowing System</i> (X ₃)	1. Aspek Struktural 2. Aspek Operasional 3. Aspek Perawatan	19 20-21 22	Likert	KNKG (2008)

Sumber : Data Diolah, 2024

Gambar 2. Definisi Operasional Variabel

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peserta penelitian ini disurvei dengan pengiriman kuesioner . Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung, 36 orang (termasuk kepala bidang, sekretaris, bagian keuangan, administrasi dan staff) mengisi kuesioner di organisasi masing-masing. Keseluruhan kuesioner telah terisi lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Tabel 1. Uji Validitas

No	Variabel	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	Keterangan
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)			
	Y1	0,845	0,000	Valid
	Y2	0,880	0,000	Valid
	Y3	0,816	0,000	Valid
	Y4	0,838	0,000	Valid
	Y5	0,838	0,000	Valid
	Y6	0,816	0,000	Valid
2	Penerapanan Akuntansi Sektor Publik (X ₁)			
	X1.1	0,875	0,000	Valid
	X1.2	0,785	0,000	Valid
	X1.3	0,919	0,000	Valid
	X1.4	0,818	0,000	Valid
	X1.5	0,850	0,000	
3	<i>Good Corporate Governance</i> (X ₂)			
	X2.1	0,892	0,000	Valid
	X2.2	0,865	0,000	Valid
	X2.3	0,792	0,000	Valid
	X2.4	0,910	0,000	Valid
	X2.5	0,910	0,000	Valid
	X2.6	0,874	0,000	Valid
	X2.7	0,840	0,000	Valid
4	<i>Whistleblowing System</i> (X ₃)			
	X3.1	0,707	0,000	Valid
	X3.2	0,684	0,000	Valid
	X3.3	0,449	0,006	Valid
	X3.4	0,391	0,018	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien berada diatas 0,30 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Variabel
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,914	Reliabel
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	0,904	Reliabel
<i>Good Corporate Governance</i> (X2)	0,945	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i> (X3)	0,944	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa semua variable memiliki nilai koefisien alpa lebih besar dari 0,6 dengan demikian semua instrumen adalah reliabel.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,23684715
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,083
	Negative	-,104
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji normalitas pada Tabel 3. menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang berarti bahwa nilai nya lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3,227	5,441		,593	,557			
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,052	,005	,925	1,081	
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,311	,090	-,437	-3,459	,002	,934	1,070	

<i>Whistleblowing System</i>	,807	,379	,262	2,131	,041	,989	1,011
------------------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari Tabel 4. menunjukkan bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $tolerance \geq 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,374	2,105		2,078	,046
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	-,016	,109	-,029	-,147	,884
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,037	,075	-,098	-,497	,622
	<i>Whistleblowing System</i>	-,115	,130	-,160	-,882	,384

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari Tabel 5. menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada nilai signifikansi variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik 0,884, *Good Corporate Governance* 0,622, dan *Whistleblowing System* 0,384 hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,227	5,441		,593	,557
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,052	,005
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,311	,090	-,437	-3,459	,002

<i>Whistleblowing System</i>	,807	,379	,262	2,131	,041
------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji kelayakan model yang disajikan pada Tabel 6. menunjukkan persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Pencegahan } Fraud = 3,227 + 0,614 X_1 - 0,311 X_2 + 0,807 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda yang telah diuraikan sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1). Nilai Konstanta sebesar 3,227 memiliki arti bahwa variabel *Pencegahan Fraud* (Y) memiliki nilai 3,227 jika variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* sama dengan 0.
- 2). Nilai koefisien regresi X_1 Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebesar 0,614 yang berarti bahwa apabila variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik naik 1 satuan, maka variabel dependen, yaitu *Pencegahan Fraud* akan meningkat sebesar 0,614 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
- 3). Nilai koefisien regresi X_2 *Good Corporate Governance* sebesar 0,311 yang berarti bahwa apabila variabel *Good Corporate Governance* naik 1 satuan, maka variabel dependen, yaitu *Pencegahan Fraud* akan menurun sebesar 0,311 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Nilai koefisien regresi X_3 *Whistleblowing System* sebesar 0,807 yang berarti bahwa apabila variabel *Whistleblowing System* naik 1 satuan, maka variabel dependen, yaitu *Pencegahan Fraud* akan meningkat juga sebesar 0,807 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Tabel 7.

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470,120	3	156,707	11,645	,000 ^b
	Residual	430,630	32	13,457		
	Total	900,750	35			

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

b. Predictors: (Constant), *Whistleblowing System*, *Good Corporate Governance*, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sumber: Data diolah, 2024

Dari Tabel 7. Uji f diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 Hal ini berarti bahwa model regresi layak dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*.

Tabel 8. Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,227	5,441		,593	,557
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	,614	,201	,388	3,052	,005
	<i>Good Corporate Governance</i>	-,311	,090	-,437	-3,459	,002
	<i>Whistleblowing System</i>	,807	,379	,262	2,131	,041

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari Tabel 8. Menunjukkan beberapa hipotesis yaitu:

1). Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,052 dan nilai koefisien regresi 0,614 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

2). *Good Corporate Governance* (X_2)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel *Good Corporate Governance* (X_2) diperoleh nilai t hitung sebesar -3,459 dan nilai koefisien regresi -0,311 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “*Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

3). *Whistleblowing System* (X_3)

Hasil statistik uji hipotesis untuk variabel *Whistleblowing System* (X_3) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,131 dan nilai koefisien regresi 0,807 dengan nilai

signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan “*Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud* pada OPD Kabupaten Badung diterima”.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,722 ^a	,522	,477	3,668

a. Predictors: (Constant), *Whistleblowing System* , *Good Corporate Governance*, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukkan dari angka *Adjusted R Square* pada Tabel 9. Koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,477 memiliki arti bahwa sebesar 47,7% Pencegahan *Fraud* dipengaruhi oleh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*. sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian ini secara umum, sebagai berikut:

- 1). Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan akuntansi sektor publik, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah penerapan akuntansi sektor publik, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun
- 2). *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. . Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *good corporate governance*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah

good corporate governance, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat

- 3). *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* pada Organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Badung akan menurun.

Daftar Pustaka

Albrecht & Zimbelman (2017). *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage Learning.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribuan Rupiah) 2020-2022. Tersedia pada <https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html> diakses pada 12 Juni 2024

Bastian, I. 2015. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Bapenda. 2022. “Rp. 3,1 Triliun, Realisasi PAD Badung 2022, PHR Penyumbang Pendapatan Terbesar”. Tersedia pada <https://bapenda.badungkab.go.id/berita/47049-rp-3-1-triliun-realisasi-pad-badung-2022-phr-penyumbang-pendapatan-terbesar#:~:text=Rp%203%2C1%20Triliun%2C%20Realisasi,Penyumbang%20Pendapatan%20Terbesar%20%7C%20Bapenda%20Badung> diakses pada 12 Juni 2024

Badung, Diskominfo. 2023. “Visi dan Misi Kabupaten Badung”. Tersedia pada <https://badungkab.go.id/kab/visimisi> (diakses pada -5 Oktober 2024)

Binus. 2020. “Jenis fraud dan cabang dari kecurangan yang dapat terjadi di suatu perusahaan”. Tersedia pada <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-fraud/> diakses pada 12 Juni 2024

Brandon, James R. (2013). *Whistle-blowing*. Massachusetts: Cambridge University Press.

Corporate Governance. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Creasey. (1953), “A Study In The Social Psychology of Embezzlement”.

- Fachrurroji, A. A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Laporan Keuangan. JAMMI, 1 Nomor 1, 1-11.
- Farochi Fauzal Famullah M dan Arief Himmawan Dwi Nugroho. 2022. "Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap pencegahan fraud". Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6, Nomer 1(hlm.1-7).
- Fakhruddin, H. (2014). Tata Kelola Perusahaan. Di unduh tanggal 16 September 2024, <http://ebook.pmli.co.id>.
- Ghozali, I. (2014). Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis dengan Program SPSS IMB SPSS 23.
- Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta:CV. Andi.
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - Spp (Whistleblowing System – WBS).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
- Kurniawan, Ardeno, 2015, Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional, BPFE: Yogyakarta.
- Kurniawan Cahyo Pratomo dan Khairina Nur Izzaty. 2019. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud".Journal of economic and banking, Volume 1, Nomor 1(hlm.1-6).
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. ECONBANK: Journal of Economics and Banking, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.2>.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Rahayu dkk.2022."Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Studi Kasus Pada RSUD Ngimbang". "Pencegahan fraud menurut Karyono 2013".
<https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melatistiekhad/article/view/3>
- Ratmono dkk.2015."DAPATKAH TEORI FRAUD TRIANGLE MENJELASKAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN?".Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Nomor 1 (hlm.101-109).
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.

- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan: R&D, Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,Cv
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet. In Sugiyono. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Tuanakotta, T. M. 2010. Akuntansi Forensi dan Audit Investigasi (II). Salemba Empat.